

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT DI KENAGARIAN SUNGAI TUNU KECAMATAN
RANAH PESISIR, KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada tim penguji sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan di
fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Padang*



WIDO FRANSISCO REDY
NIM. 1306058

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANACASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PADANG
2017**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : **Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama : Wido Fransisco Redy

TM/ NIM : 2013/1306058

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

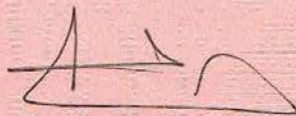
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 juli 2017

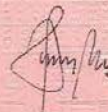
Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Akmal, SH., M. Si
NIP. 19620704 198803 1 003

PEMBIMBING II



Henni Muchtar, SH., M. Hum
NIP. 19640305 199003 2 010

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah di pertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

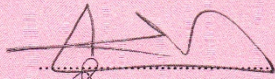



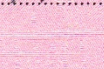
Pada hari jum'at, tanggal 28 juli 2017 pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di
Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan**

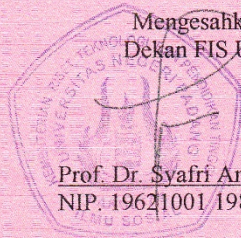
Nama : Wido Fransisco Redy
TM/ NIM : 2013/1306058
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 juli 2017

Tim penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Dr. Akmal , SH., M.Si	
Sekretaris : Henni Muchtar, SH., M.,Hum	
Anggota : Dr. Fatmariza, M. Hum	
Anggota : Dr. Junaidi Indrawadi, M. Pd	
Anggota : Susi Fitria Dewi, S. Sos., M.Si., Ph.D	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 196210011989031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wido Fransisco Redy
Tm /Nim : 2013/1306058
Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakulta : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kenagarian Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan”** adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang di sebutkan sumbernya. Apanila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia di proses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 28 juli 2017

Saya yang menyatakan



WIDO FRANSISCO REDY

2013/ 1306058

ABSTRAK

WIDO FRANSISCO REDY: PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KENAGARIAN SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan kendala-kendala Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kenagarian sungai tunu, kecamatan ranah pesisir, kabupaten pesisir selatan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, yang menggunakan kata-kata, sumber tertulis, dan foto. Penelitian ini dilakukan di kenagarian sungai tunu, kecamatan ranah pesisir, kabupaten pesisir selatan. Informan dalam penelitian ini mulai dari perangkat KAN, pihak yang bersengketa, kepala kampung, bamus, mamak waris. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, obeservasi, studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat ada tiga tahap yaitu mediator, klarifikator, pengambilan keputusan. Peranan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat belum berjalan optimal ini terlihat dari lima kasus yang masuk ke KAN hanya satu kasus yang terselesaikan dan empat kasus tidak terselesaikan oleh KAN, adapun kendala-kendala KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat ada empat yaitu KAN belum punya kantor sendiri, tidak ketersediaan dokumen (ranji dan surat tanah), tingkat ekonomi anggota KAN masih rendah, sumber daya manusia anggota KAN rendah, keberpihakan niniak mamak kepada salah satu pihak yang bersengketa dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci: Kerapatan Adat Nagari, Tanah Ulayat

Abstract

This research aims to determine the role and constraints of Kerapatan Adat Nagari (KAN) in the completion of Ulayat Land disputes in Kenagarian Sungai Tunu, Ranah Pesisir, Pesisir Selatan.

This type of research is qualitative with descriptive method, which uses words, written sources, and photos. This research was conducted in Sungai Tunu, Ranah Pesisir, Pesisir Selatan. The informants in this research are the functionary of KAN, the parts that have a legal dispute, head of the village, bamus, mamak waris. Data collection techniques include interviews, observation, documentation studies.

The results of this research indicate that the role of KAN in the completion of ulayat land disputes, there are three stages of the mediator, clarificator, decision making. The role of KAN in the settlement of ulayat land disputes has not been optimal yet. It can be seen from the five cases that enter the KAN which only one case is solved and four cases are not resolved by KAN, while there are four obstacles in the completion of ulayat land dispute that KAN faced such as KAN has no own office , unavailability of documents (ranji and land certificate), the economic level of KAN members is still low, human resources of low KAN members, the partiality of mamak to one of the parties in dispute in decision making.

Keyword : *Kerapatan Adat Nagari, Ulayat Land*

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KENAGARIAN SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR, KABUPATEN PESISIR SELATAN”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas oleh peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Ibu Dr. Fatmariza M.Hum selaku Ketua Jurusan dan penguji dan Bapak Dr. Junaidi indrawadi M.pd selaku sekretaris dan penguji Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Dr. Akmal, SH. M, si selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, Koreksi, dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
4. Ibu Henni muchtar, SH, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, motivasi kepada Penulis dalam penulisan Skripsi ini.
5. Susi fitria dewi S.Sos., M.Si., Ph. D, Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua, yang memberikan dukungan dan semangat tanpa henti.
9. Rekan-rekan mahasiswa teristimewa mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) angkatan 2013.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun/konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirul-kalam, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Juni 2017

Wido fransisco redy

1306058/ 2013

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	7
1. Kerapatan Adat Nagari (KAN)	7
2. Tanah Ulayat.....	14
B. Penelitian yang Relevan.....	21
C. Kerangka Konseptual.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi penelitian.....	24
C. Informan penelitian.....	25
D. Jenis dan sumber data.....	26
E. Teknik pengumpulan data.....	27
F. Alat pengumpulan data.....	28
G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian.....	32
1. Temuan umum.....	32
a. Profil kenagarian sungai tunu.....	32
b. Letak geografis.....	33

c. Kondisi demografis.....	33
2. Temuan khusus.....	38
a. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.....	38
b. Kendala-kendala yang di hadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian tanah ulayat	73
B. Pembahasan.....	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1.1 Jumlah sengketa tanah ulayat kaum.....	4
4.1.1 Jumlah penduduk kenagarian Sungai Tunu.....	33
4.1.2 Macam-macam suku dan datuknya.....	34
4.1.3 Mata pencaharian di kenagarian Sungai Tunu.....	35
4.1.4 Tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota KAN Sungai Tunu.....	37
4.2.1 Jumlah kasus sengketa tanah ulayat kaum yg masuk ke KAN.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga adat di Indonesia khususnya di Sumatera Barat yang dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi Mengusahakan perdamaian terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak. Lembaga adat ini keberadaanya seiring dengan berdirinya suatu nagari dengan nama yang berbeda-beda di masing-masing nagari. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sangat penting, karena selain mengurus, memelihara dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat nagari, di samping itu Kerapatan Adat Nagari berperan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat suku atau kaum.

Peraturan daerah No. 2 Tahun 2007 pasal 1 angka 13 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan KAN adalah lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

Sengketa tanah ulayat merupakan sengketa yang mayoritas terjadi di Sumatera Barat dan yang sangat dominan terjadi di nagari-nagari di Sumatera

barat, ini dilatar belakangi oleh perkembangan nagari yang semakin berkembang yang mengakibatkan kebutuhan tanah mengalami peningkatan luar biasa.

Masalah sengketa tanah ulayat diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat para Ninik Mamak atau fungsionaris adat, apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan secara adat maka melalui pengadilan penyelesaian sengketa ini diselesaikan. Keistimewaan negeri (nagari) di Minangkabau terlihat pada susunan masyarakatnya yang terdiri dari paling sedikit empat suku, masing-masing suku terdiri dari beberapa kaum, masing-masing suku terdiri oleh seorang penghulu. Himpunan penghulu di suatu nagari disebut Ninik Mamak.

Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor : W3.DA.HT.04.02-3633 yang pada intinya menyebutkan bahwa permasalahan sako dan pusako harus diselesaikan terlebih dahulu di KAN. Bila belum ditangani oleh KAN, maka pengadilan tidak dapat mengadilinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat menjunjung tinggi azas keistimewaan suatu daerah, dan juga menunjukkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) diberikan suatu kewenangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam lingkup adat yang ada di nagari.

Menurut pendapat Nasrul S.Ag Datuak Bandaro Hitam Ketua KAN Kenagariaian Sungai Tunu tentang penyelesaian sengketa tanah ualyat, sebaiknya sengketa tanah ulayat cukup diselesaikan oleh KAN setempat, putusan KAN mengikat kedua belah pihak. Perkara tersebut tidak perlu diajukan ke pengadilan, sebab pandangan ketua KAN berperkara ke pengadilan kedua belah pihak akan rugi, seperti petua orang tua-tua, nan kalah jadi abu, nan menang jadi baro.

Nagari tersebut salah satunya adalah Kenagarian Sungai Tunu dimana sengketa tanah ulayat sangat dominan terjadi dan menurut hukum adat Minangkabau bila terjadinya sengketa atau perselisihan dalam suatu kaum diselesaikan secara mufakat diantara anggota kaum atau penghulu kaum yang berakhir pada Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Berdasarkan wawancara awal dengan Nasrul, S.Ag. ketua KAN di kenagarian sungai tunu. Beliau mengatakan, KAN dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga yang bertugas menjalankan hukum adat terutama sengketa tanah ulayat belum maksimal. Ini terlihat seperti banyaknya masyarakat di nagari yang mengabaikan KAN. Dengan melaporkan sengketa tanahnya kepada lembaga seperti kepolisian, kantor pertanahan daerah, karena kepolisian atau kantor pertanahan melihat ini sebagai wewenang KAN, yaitu Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat maka pihak kepolisian dan pertanahan mengembalikan kembali ke KAN. Namun jika sudah sampai di KAN ada juga masyarakat yang tidak merasa senang dengan putusan KAN maka salah satu pihak bisa melanjutkan ke pengadilan.

Menurut data yang diperoleh dari arsip Kerapatan Adat Nagari (KAN) sungai tunu kecamatan ranah pesisir oleh ketua KAN Bapak Nasrul S.Ag Datuak Bandaro Hitam, bahwa telah terjadi kasus sengketa tanah ulayat kaum (pusako tinggi) dari tahun 2011-2015:

Tabel 1.1 Jumlah kasus sengketa Tanah Ulayat kaum

NO	PENGGUGAT	TERGUGAT	TAHUN	KETERANGAN
1	Endi	Barian	2011	Tidak terselesaikan oleh KAN
2	Yusbainal	Lumas	2012	Tidak terselesaikan oleh KAN
3	Pidas	Mardiani	2013	Terselesaikan di KAN
4	Siim	Mansyur	2013	Tidak terselesaikan oleh KAN
5	Marianis	Imam sidin	2015	Tidak terselesaikan oleh KAN

Sumber data: Arsip KAN Kenagarian Sungai Tunu 2016.

Oleh karena itulah penulis melakukan penelitian dengan mengangkatnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul, **“Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kenagarain Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kab Pesisir Selatan.”**

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut

1. Masyarakat di Nagari Sungai Tunu mengabaikan peranan KAN dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat.
2. Masyarakat menganggap bahwa fungsi KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat belum optimal.

3. Eksistensi KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat mulai memudar.
4. Keistimewaan KAN dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor : W3.DA.HT.04.02-3633 tidak berjalan dengan semestinya.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah masalah penelitian ini di batasi pada Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kenagarian sungai tunu, kecamatan Ranah pesisir, kabupaten Pesisir selatan.

D. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di kenagarian Sungai tunu kecamatan ranah pesisir, kabupaten pesisir selatan ini maka penulis akan membahas beberapa masalah yang hendak diteliti yaitu :

1. Bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam proses penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di kenagarian Sungai tunu, Kecamatan Ranah pesisir?
2. Kendala apa saja yang di hadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa Tanah ulayat di kenagarian Sungai Tunu, kecamatan Ranah Pesisir?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam proses penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kenagariaian Sungai Tunu Kecamatan Ranah pesisir.
2. Mengungkapkan kendala-kendala yang di hadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa Tanah ulayat di kenagarian Sungai Tunu, kecamatan Ranah Pesisir

F. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa konsep, maupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum adat dan masyarakat pada jurusan PPKn.
2. Dari segi pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (input) bagi Kerapatan Adat Nagari, di Kenagariaian Sungai Tunu kecamatan Ranah pesisir, pemerintah Kabupaten Pesisir selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di sampingmaka penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Peranan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kenegarian sungai tunu dilakukan dsengan beberapa tahaap yaitu dengan mediator, klarifikator (clarificator), pengambilan keputusan (decision master). Peranan KAN belum berjalan optimal ini terlihat dari lima kasus sengketa yang masuk ke KAN yang terselesaikan hanya satu kasus dan empat kasus lainnya tidak terselesaikan.
2. Kendala-kendala kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kenegarian sungai tunu di sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Kerapatan adat nagari yang belum mempunyai kantor sendiri.
 - b. Ketidak ketersediaan dokumen
 - c. Tingkat ekonomi anggota KAN masih rendah
 - d. Sumber daya manusia anggota KAN masih rendah.
 - e. Pro dan kontra peran ninik mamak yang terpecah secara tidak langsung pro dan kontra atau pecahnya ninik mamak menurut kepentingan mereka masing-masing, bagaimanan akan menjadikan lembaga lembaga permusyawaratan yang tertinggi sedangkan yang menjadi unsur KAN itu sendiri ada yang terpecah bela.

B. Saran

Ada beberapa saran penulis yang ingin di kemukakan sehubungan dengan peranan kerapatan adat nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat:

1. Agar pemerintah memberikan pelatihan, bimbingan atau pembinaan terhadap pengurus kerapatan adat nagari KAN di bidang hukum, pemerintahan dan organisasi. Untuk ,menambah wawasan dan pengetahuan para pengurusnya.
2. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, hendaknya KAN mendapatkan tempat yang layak untuk kepengurusannya untuk melaksanakan aktifitas, oleh karenanya penulis menyarankan agar pemerintah daerah memberikan fasilitas tempat (kantor).
3. Agar para ninik mamak, mamak kepala waris, penghulu suku dan masyarakat agar bertindak proaktif dalam mencegah timbulnya sengketa yang timbul dalam mengenai tanah ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola Dan Tinjauan Hidup Orang Minang*, Mutia Sumber Widya, Jakarta, 2003.

Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1989.

Edisoan Ms. 2010. *tambo minang kabau budaya dan hukum adat di minangkabau*. Kristal multimedia. Bukittinggi.

Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA 3 Malang.

Hakimi D. Dt. *Penghulu, Pedoman Ninik Mamak Pemangku Adat*, Biro Pembinaan Adat dan Syarak, LKAAM Provinsi Sumatera Barat.

Hasan, firman. 1998. *Dinamika masyarakat dan adat minang kabau*, pusat penelitian Universitas Andalas, padang.

Idrus Hakimy, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*, CV.Remaja Karya, Bandung, 1988

Nurullah, 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. PT Singgalang Press, Padang.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono, 2009. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung alfabeta

2. Perundang-undangan:

Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang tugas dan fungsi KAN

Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang peranan KAN

Perda Tingkat I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang wewenang KAN

Surat Keputusan Gubernur No. 156/GSB/1974 tentang diatur kembali fungsi dari Kerapatan Adat Nagari ini.

Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983

peraturan daerah Kabupaten pesisir selatan No 5 Tahun 2009 pasal 56 ayat C dan D